

## **ANALISIS PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH MELALUI PENDEKATAN JARINGAN AKTOR DI KABUPATEN CIAMIS**

**Kiki Endah**

Universitas Galuh, Ciamis Indonesia

\*Korespondensi : kikiendah@unigal.ac.id

### **ABSTRAK**

Masalah permukiman kumuh merupakan salah satu polemik yang terjadi pada beberapa wilayah perkotaan, jika dibiarkan berdampak negatif pada semakin luas permukiman kumuh, kerusakan lingkungan dan dampak kesehatan bagi masyarakat. Kabupaten Ciamis sebagai salah satu kabupaten yang berada di Jawa Barat mengalami permasalahan berkaitan permukiman kumuh sehingga diperlukan penanganan dari jaringan aktor-aktor yang terlibat. Penanganan permukiman kumuh di Kabupaten Ciamis merupakan tantangan yang memerlukan pendekatan kolaboratif dan terintegrasi. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa penanganan permukiman kumuh di Kabupaten Ciamis memerlukan pendekatan yang lebih kolaboratif dan sinergi. Semua aktor dalam jaringan perlu lebih intensif dan terbuka dilibatkan dalam setiap proses tata kelola kebijakan berkaitan penanganan permukiman kumuh agar menghasilkan solusi yang inovatif dan berkelanjutan. Perlu disusun regulasi Peraturan Daerah (Perda) yang khusus mengatur tentang Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh. Peraturan Daerah (Perda) menjadi acuan bagi aktor-aktor yang terlibat untuk lebih bersinergis dan bersatu padu dalam penanganan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Ciamis. Penanganan permukiman kumuh di Kabupaten Ciamis juga membutuhkan komitmen bersama dari semua aktor yang terlibat, yaitu pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat. Setiap aktor memiliki peran dan kontribusi yang penting dalam upaya Penanganan permukiman kumuh di Kabupaten Ciamis. Komitmen yang kuat dan kerjasama yang baik antara berbagai aktor yang terlibat, dapat menangani masalah permukiman kumuh di Kabupaten Ciamis.

**Kata Kunci :** Penanganan, Permukiman Kumuh, Jaringan Aktor, Kabupaten Ciamis.

### **ABSTRACT**

*The problem of slums is one of the polemics that occurs in several urban areas, if left unchecked it will have a negative impact on the expansion of slums, environmental damage and health impacts on the community. Ciamis Regency as one of the regencies in West Java experiences problems related to slums so that a network of actors involved in handling it is needed. Handling slums in Ciamis Regency is a challenge that requires a collaborative and integrated approach. The results of the study obtained that handling slums in Ciamis Regency requires a more collaborative and synergistic approach. It is necessary to compile a Regional Regulation (Perda) regulation that specifically regulates the Prevention and improvement of the quality of slums, with the Regional Regulation (Perda) regulation as a reference for the actors involved to be more synergistic and united in handling slum areas in Ciamis Regency. Handling slums in Ciamis Regency*

*also requires a joint commitment from all actors involved, namely the government, academics, the private sector, and the community. Each actor has an important role and contribution in the efforts to handle slums in Ciamis Regency. With a strong commitment and good cooperation between the various actors involved, the problem of slums in Ciamis Regency can be handled. Through comprehensive and integrated efforts, a more decent, healthy, and prosperous residential environment can be created for all residents of Ciamis Regency.*

**Keywords :** *Handling, Slums, Actor Network, Ciamis Regency.*

## A. PENDAHULUAN

Isu utama pembangunan perkotaan pada beberapa negara dibelahan dunia termasuk Indonesia adalah berkaitan dengan permasalahan permukiman. Mengamati data *Worldometers* bahwa jumlah penduduk Indonesia tahun 2019 mengalami kepadatan sebesar 3,49% atau 269 juta jiwa dari total penduduk belahan dunia dan menduduki rangking keempat kepadatan penduduk setelah negara Amerika Serikat. Masalah permukiman terjadi karena keterbatasan lahan di kota dan tidak berbanding dengan perkembangan penduduk kota, sehingga berakibat permukiman mengalami kepadatan pada beberapa daerah atau wilayah tertentu. Jumlah penduduk yang tinggi dan tidak terkendali serta sebaran penduduk tidak merata salah satu penyebab timbulnya permasalahan negara. Data World Bank tahun 2019 bahwa penduduk Indonesia yang tinggal di kota mencapai 50% dan terus akan meningkat pada tahun 2045 lebih dari 70% tinggal di kota. Berdasarkan data dari Dirjen Cipta Karya bahwa hampir di wilayah perkotaan masih terdapat 35.291 Ha permukiman kumuh pada tahun 2016. Kepadatan yang terjadi pada beberapa wilayah atau daerah tertentu bisa disebabkan karena urbanisasi yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota. Urbanisasi terjadi disebabkan

beberapa faktor, diantaranya adalah faktor daya tarik kota yang lebih menjanjikan dalam memberikan lapangan pekerjaan dengan upah yang besar dan menggiurkan. Pertumbuhan dan konsentrasi penduduk cenderung lebih cepat di kota-kota besar, hampir separuh penduduk Indonesia memilih tinggal di perkotaan (Yulia 2017).

Bertambahnya jumlah penduduk di kota berdampak pada tuntutan masyarakat urban untuk mendapatkan lahan tempat tinggal, tetapi disatu sisi perkotaan dengan luasan lahannya tidak berubah atau tetap. Keterbatasan penghasilan ekonomi masyarakat yang dimiliki berdampak pada sulitnya memperoleh tempat tinggal terjangkau atau murah di kota, konsekwensi keterbatasan pendapatan ekonomi menyebabkan banyak masyarakat mendirikan bangunan sebagai rumah tinggal pada lahan lahan sempit maupun lahan illegal. Kondisi permukiman mencerminkan banyaknya rumah tidak layak huni dan rusak, bangunan rumah kurang memadai, serta kepadatan permukiman yang tinggi (Nur Azizah Rangkuti *et al.*, 2023:17). Urbanisasi yang tinggi di daerah perkotaan menyebabkan peralihan fungsi lahan kosong. (Firsa Asha Sabitha *et al.*, 2022). Rumah yang dibangun sebagai tempat tinggal oleh masyarakat jauh dari kata layak huni dan sehat sehingga berakibat pada kesehatan

bahkan membahayakan keberlangsungan hidup penghuninya. Penyebaran penduduk yang pesat di kota menimbulkan masalah lingkungan, munculnya permukiman kumuh pada lahan kosong di perkotaan (Triana Wahyu Prayojana *et al.*, 2020).

Ketidakteraturan serta tingkat kepadatan bangunan yang didirikan tanpa terencana tersebut jika dibiarkan akan berdampak pada alih fungsi lahan menjadi permukiman kumuh. Lebih lanjut Kementerian PUPR, 2018 memberikan penjelasan bahwa permukiman kumuh sebagai kondisi permukiman yang memiliki bangunan dengan kepadatan tinggi, kualitas sarana prasarana serta

bangunan yang tidak memenuhi syarat diantaranya seperti tidak terdapat jalan bangunan, air bersih, drainase lingkungan, pengelolaan persampahan serta keamanan. Peningkatan penduduk kota dan tidak diimbangi ketersediaan ruang, sarana serta prasarana permukiman juga utilitas memadai mengakibatkan permukiman menjadi kumuh dan padat (Nidn, 2020).

Kabupaten Ciamis sebagai salah satu kabupaten di Propinsi Jawa barat tidak luput dari permasalahan permukiman kumuh. Beberapa sebaran permukiman kumuh di Kabupaten Ciamis dapat dilihat dari Tabel di bawah.

**Tabel 1**  
**Sebaran perumahan kumuh dan permukiman Kumuh di Kabupaten Ciamis**

No.	Nama Lokasi/Kec. (Desa/Kel/RW/RT)	Luas Kumuh (Ha)	Kependudukan		Kekumuhan
			Jlh	Kepadatan	
1.	Karangbakti/Baregbeg (Baregbeg/RT 001, 002, 003)	1,68	405	727,51	Kumuh ringan
2.	Ciwahangan/Baregbeg (Baregbeg/RT 004, 005)	1,29	274	494,87	Kumuh ringan
3.	Injuk/Baregbeg (Mekarjaya/RT 001, 002, 003, 004)	3,07	723	1.499,97	Kumuh ringan
4.	Tambang/Baregbeg (Mekarjaya/RT 006)	0,47	103	219,15	Kumuh ringan
5.	Sukasenang I/Bojongmengger (Cijeungjing RT 001, 002, 006)	7,25	485	692,09	Kumuh ringan
6.	Sukasenang II/Bojongmengger (Cijeungjing RT 003, 004, 005)	3,42	359	312,13	Kumuh ringan

No.	Nama Lokasi/Kec. (Desa/Kel/RW/RT)	Luas Kumuh (Ha)	Kependudukan		Kekumuhan
			Jlh	Kepadatan	
7.	Cisihung I/Bojongmengger (Cijeungjing RT 001, 002)	3,88	453	468,22	Kumuh ringan
8.	Cisihung II/Bojongmengger (Cijeungjing RT 003, 005, 006)	2,19	338	313,16	Kumuh ringan
9.	Cisihung III/Bojongmengger (Cijeungjing RT 004)	1,16	126	108,62	Kumuh ringan
10.	Cimengger I/Bojongmengger Cijeungjing RT 002, 003, 004, 005, 006)	8,73	645	462,37	Kumuh ringan
11.	Cireong (Sukaresik (Non SK) Sindangkasih RW/RT 005/010,011, RW/RT 007/015,016, RW/RT 009/020	6,66	687	723,58	Kumuh Sedang
12.	Cileueur/Ciamis (Maleber RW/RT 011/004, RW/RT 005/001,002,003, RW/RT 001/ 001,002,003, 004, RW/RT 002/ 001,002,003, 004, RW/RT 004/ 001,002,003, RW/RT 013/ 004)	22,02	208 7	2679,83	Kumuh ringan
13.	Sukamulya/Ciamis (Ciamis RW/RT 020/ 001, 002 ,003, 004, 005, RW/RT 021/ 001, 002, 003, 004, 005, RW/RT 023/ 004, 005, 006)	11,87	155 3	1966,03	Kumuh ringan

Sumber : DPRKPLH, 2021

Terlihat dari tabel di atas bahwa sebaran permukiman Kumuh di Kabupaten Ciamis hampir beberapa lokasi terdapat kepadatan penduduk seperti pada lokasi Karangbakti dengan luas kumuh 1,68 ha memiliki penduduk dengan jumlah 405 jiwa dan memiliki kepadatan penduduk 727,51 jiwa/ha, Ciwahangan luas kumuh 1,29 ha memiliki penduduk dengan jumlah 274 jiwa dan memiliki kepadatan penduduk 494,87 jiwa/ha, Injuk luas kumuh 3,07 ha dengan jumlah penduduk 723 jiwa dan memiliki kepadatan penduduk 1.499,97 jiwa/ha, Tambang luas kumuh 0,47 ha dengan jumlah penduduk 103 jiwa dan memiliki kepadatan penduduk 219,15 jiwa/ha, Sukasenang I luas kumuh 7,25 ha dengan jumlah penduduk 485 jiwa dan memiliki kepadatan penduduk 692,09 jiwa/ha, Cisihung I luas kumuh 3,88 ha dengan jumlah penduduk 453 jiwa dan memiliki kepadatan penduduk 468,22 jiwa/ha, Cileueur luas kumuh 22,02 ha dengan jumlah penduduk 2087 jiwa dan memiliki kepadatan penduduk 2679,83 jiwa/ha, Sukamulya luas kumuh 11,87 ha dengan jumlah penduduk 1553 jiwa dan memiliki kepadatan penduduk 1966,03 jiwa/ha dengan kondisi kumuh ringan. Lokasi Cireong luas kumuh 6,66 ha dengan jumlah penduduk 687 jiwa dan memiliki kepadatan penduduk 723,58 jiwa/ha, dengan kondisi kumuh sedang. Kriteria parameter permukiman kumuh Kabupaten Ciamis seperti ketidakberaturan bangunan, kerapatan bangunan, kondisi fisik bangunan, jalan lingkungan, drainase lingkungan, ketersediaan pembuangan air limbah, ketersediaan air bersih dan air minum, pengelolaan sampah serta pengamanan bahaya kebakaran masih

perlu perbaikan dan penanganan. Permukiman sebagai kawasan perumahan berfungsi sebagai unit fisik, sosial, dan ekonomi yang memiliki prasarana lingkungan, prasarana dan sarana umum, serta fasilitas sosial yang dimanfaatkan sebagai lingkungan kehidupan (Ridlo, 2020).

Kolaborasi antara pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, akademisi penting untuk mencapai upaya terkoordinasi dan terpadu dalam mengelola wilayah permukiman kumuh, menekankan kerja sama antar jaringan aktor dalam mengatasi tantangan permukiman kumuh. Keterlibatan *stakeholder*, masyarakat, sektor swasta dan akademisi melalui kolaborasi memberikan pengaruh pada pemecahan dan penanganan masalah sosial (Evi Satispi *et al.*, 2022).

## B. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini, Metode kualitatif digunakan karena mampu mendeskripsikan latar dan interaksi yang kompleks, mengeksplorasi berbagai jenis informasi, mendeskripsikan fenomena, memahami proses, dan menemukan makna dari setiap pola perilaku yang ditunjukkan oleh jaringan aktor dalam penelitian penanganan permukiman kumuh Ciamis. Penelitian kualitatif Basrowi & Suwandi (2008: 2) bahwa peneliti dapat memahami subjek dan memahami kehidupan sehari-hari mereka. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Dalam teknik pengumpulan data penulis menggunakan data primer dan data sekunder, Creswell (2012:24-25) mengatakan data dalam penelitian penting dimana data meliputi

hasil wawancara, data observasi, serta data dokumentasi. Data primer terdiri dari pernyataan atau informasi langsung dari sumbernya, yang merupakan subjek dan subjek penelitian. Data sekunder berupa dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian, serta mengidentifikasi informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Beberapa informan dipilih karena mereka lebih mengetahui dan memiliki informasi penting serta diharapkan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. Metode pengumpulan data yang digunakan dan informasi adalah pengamatan (*observation*), wawancara mendalam dengan informan, dan studi dokumentasi.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam konteks penanganan permukiman kumuh melalui pendekatan jaringan aktor, teori Waarden menekankan pentingnya nilai-nilai dalam proses pembuatan kebijakan. Nilai-nilai bukan hanya terbatas pada norma-norma moral atau etika, tetapi juga mencakup kepentingan, preferensi, dan prioritas dari berbagai aktor yang terlibat dalam proses kebijakan. Nilai-nilai ini dapat bervariasi antara aktor-aktor seperti pemerintah, masyarakat, sektor swasta dan lainnya.

#### a. Aktor (*Actors*)

Keberagaman aktor yang terlibat menunjukkan pentingnya pendekatan jaringan aktor dalam penanganan permukiman kumuh. Setiap aktor memiliki peran tersendiri yang saling melengkapi, sehingga sinergi antar aktor menjadi kunci keberhasilan. Keberhasilan program atau proses kebijakan bergantung pada peran aktor, kondisi, dan kapasitas, serta kepemimpinan lokal (Nikki Prafitri *et al.*, 2021).

Penanganan permukiman kumuh merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan daerah, terutama di wilayah-wilayah yang mengalami urbanisasi cepat. Kabupaten Ciamis, sebagai salah satu wilayah yang berkembang pesat, menghadapi masalah permukiman kumuh sehingga memerlukan pendekatan holistik dan kolaboratif. Aktor yang terlibat dalam penanganan permukiman kumuh yaitu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ciamis, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Ciamis, Dinas Kesehatan, dan dinas terkait lainnya, sektor swasta, masyarakat yang berada pada permukiman kumuh, dan akademisi. Teori Waarden tentang aktor memiliki kerangka kerja yang komprehensif dalam memahami dinamika aktor serta interaksi jaringan antar aktor yang terlibat dalam penanganan permukiman kumuh. Pemerintah daerah Kabupaten Ciamis memiliki peran sentral dalam merumuskan kebijakan, menyediakan anggaran, dan mengkoordinasikan berbagai program penanganan permukiman kumuh, dan bertanggung jawab dalam koordinasi dengan aktor-aktor lain, baik di tingkat lokal maupun nasional. Komunitas lokal atau masyarakat setempat merupakan aktor kunci yang berperan aktif mengimplementasikan solusi yang berbasis kebutuhan masyarakat. Partisipasi Komunitas lokal atau masyarakat sangat penting memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan nyata di lapangan serta memantau dan mengevaluasi

pelaksanaan program. Sektor swasta sebagai aktor yang menyediakan dana, teknologi, dan sumber daya lain yang diperlukan untuk mendukung program-program penanganan permukiman kumuh. Kerjasama dengan sektor swasta membantu mengatasi keterbatasan anggaran dan sumber daya yang sering dihadapi oleh pemerintah daerah Kabupaten Ciamis. Akademisi memberikan kajian, data, serta rekomendasi berbasis riset untuk meningkatkan efektivitas program serta mengintegrasikan inovasi dan teknologi dalam penanganan permukiman kumuh.

b. Fungsi (*Function*)

Pemerintah daerah memiliki fungsi regulatif dalam penetapan standar perumahan, *zoning*, serta regulasi lingkungan dan peraturan yang mengatur penanganan permukiman kumuh. Pemerintah daerah Kabupaten Ciamis memfasilitasi koordinasi antar aktor, menyediakan platform untuk kolaborasi, serta memfasilitasi akses ke sumber daya dan informasi. Pemerintah daerah Kabupaten Ciamis mengalokasikan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendanai program-program penanganan permukiman kumuh. Komunitas lokal atau masyarakat lokal memiliki fungsi Berpartisipasi aktif dalam setiap tahap program, mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi hasil. Fungsi ini mencakup kehadiran dalam rapat-rapat, memberikan masukan, serta keterlibatan dalam kegiatan lapangan, Mengorganisir diri melalui kelompok-kelompok komunitas untuk meningkatkan kapasitas diri dalam berbagai aspek. Sektor swasta memberikan dana melalui Program *Corporate Social*

*Responsibility* (CSR), memperkenalkan teknologi baru yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas perumahan dan infrastruktur di permukiman kumuh, menyediakan pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi bagi penduduk permukiman kumuh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Akademisi memiliki fungsi melakukan penelitian yang mendalam mengenai berbagai aspek permukiman kumuh, termasuk kondisi sosial ekonomi, kebutuhan infrastruktur, dan dampak lingkungan. Menyediakan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti untuk pemerintah, Melakukan evaluasi terhadap program-program yang sedang berjalan untuk menilai dampak dan efektivitasnya serta memberikan saran untuk perbaikan.

c. Struktur (*Structure*)

Penanganan permukiman kumuh di Kabupaten Ciamis memerlukan keterlibatan berbagai aktor yang beroperasi dalam suatu jaringan yang terstruktur. Struktur dalam jaringan aktor menentukan bagaimana berbagai aktor berinteraksi, berbagi informasi, dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Analisis berikut untuk memahami struktur jaringan mempengaruhi efektivitas penanganan permukiman kumuh di Kabupaten Ciamis. Pemerintah daerah berada di puncak hierarki dalam struktur jaringan aktor. Komunitas lokal atau Masyarakat setempat melalui badan swadaya masyarakat di wilayah Kabupaten Ciamis berada di tingkat dasar dalam hierarki jaringan aktor. Masyarakat setempat melalui badan swadaya masyarakat sebagai penerima langsung manfaat dari program penanganan permukiman kumuh dan sebagai partisipan aktif dalam pelaksanaan

program. Dalam beberapa kesempatan, masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, terutama dalam hal identifikasi masalah dan prioritas program. Sektor swasta mendukung program yang dicanangkan pemerintah daerah Kabupaten Ciamis dengan memberikan bantuan dana, fasilitas yang dibutuhkan program dan memberikan keterampilan kepada masyarakat untuk mendukung program penanganan permukiman. Akademisi berada di posisi sebagai penyedia informasi ilmiah dalam hierarki jaringan aktor. akademisi tidak berada di garis depan pelaksanaan program, tetapi sebagai perencanaan dan evaluasi.

d. Pelembagaan (*Institutionalization*)

Dalam penanganan permukiman kumuh bupati sebagai pemerintah daerah telah mengeluarkan Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 600/Kpts.241-Huk/2017 yang dalam Keputusan Bupati terdapat tugas, fungsi, masing masing lembaga dan *stakeholder* yang terlibat dalam penanganan perumahan kumuh dan kawasan Permukiman kumuh di Kabupaten Ciamis. Selain itu mengeluarkan Keputusan Bupati mengenai penetapan Lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Ciamis melalui Keputusan Bupati No.593/Kpts.719-Huk/2021.

e. *Rules of Conduct*

Pemerintah daerah Kabupaten Ciamis memiliki peran utama dalam menetapkan kebijakan dan regulasi yang mengatur penanganan permukiman kumuh. Kebijakan ini mencakup Keputusan bupati berkaitan dengan tim penanganan permukiman kumuh dan aturan yang berhubungan dengan perumahan layak

huni, rencana strategis, dan pedoman teknis untuk landasan yang dilaksanakan oleh semua aktor yang terlibat. Masyarakat memberikan partisipasi aktif dalam pemeliharaan bangunan, sebagai subyek yang membangun fasilitas permukiman dimana mereka tinggal, ikut serta memelihara lingkungan dalam pengelolaan sampah dan lain sebagainya. *Rules of Conduct* atau aturan main yang jelas dan disepakati bersama penting untuk menghindari konflik dan memastikan setiap aktor menjalankan perannya dengan baik. Penggunaan perjanjian kerjasama dan pedoman pelaksanaan dapat membantu mengatur hubungan dan tanggung jawab antar aktor.

f. Hubungan Kekuasaan (*Power Relations*)

Hubungan kekuasaan jaringan aktor ditandai oleh dominasi Pemerintah daerah Kabupaten Ciamis dalam pengambilan keputusan strategis. Komunitas lokal atau masyarakat setempat yang berada dibawah memiliki kontribusi menjalankan kebijakan dari pemerintah daerah Kabupaten Ciamis. Sektor swasta memiliki kekuasaan dalam bentuk sumber daya finansial dan teknologi. Akademisi memiliki kekuasaan dalam bentuk pengaruh intelektual dan rekomendasi berbasis riset, akademisi dalam memberikan rekomendasi berbasis riset penting untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan program. Kerjasama dengan kekuatan kekuasaan masing-masing aktor yang seimbang dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama. Dalam perspektif jaringan aktor, pemerinah bukan aktor Tunggal tetapi ada aktor lain yang ikut proses kebijakan dalam bentuk kerjasama dan memiliki



kemampuan yang dimiliki masing-masing aktor (Dian Roshanti *et al.*, 2022)

g. Strategi Aktor (*Aktor Strategies*)

Pemerintah daerah Kabupaten Ciamis dalam posisi sebagai nahkoda membuat strategi regulasi dan fasilitasi, serta penyediaan dana dan sumber daya untuk program penanganan permukiman kumuh. Komunitas lokal atau masyarakat yang berada pada permukiman kumuh sebagai aktor ikut berpartisipasi dan kolaboratif mengidentifikasi masalah dan mencari solusi bersama. Sektor Swasta secara langsung ikut serta dalam memberikan bantuan melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan kolaborasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Ciamis.

#### D. KESIMPULAN

Penanganan permukiman kumuh di Kabupaten Ciamis memerlukan pendekatan yang lebih inklusif dan kolaboratif. Semua aktor dalam jaringan perlu lebih intensif dan terbuka dilibatkan dalam setiap proses tata kelola kebijakan berkaitan penanganan permukiman kumuh agar menghasilkan solusi yang inovatif dan berkelanjutan. Selain itu, perlu disusun regulasi Peraturan Daerah (Perda) yang khusus mengatur tentang Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh, dengan regulasi Peraturan Daerah (Perda) menjadi acuan bagi aktor-aktor yang terlibat untuk lebih terpadu dan bersinergis dalam penanganan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Ciamis.

Penanganan permukiman kumuh di Kabupaten Ciamis juga membutuhkan komitmen bersama dari semua aktor yang terlibat, yaitu pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat. Setiap

aktor memiliki peran dan kontribusi yang penting dalam upaya Penanganan permukiman kumuh di Kabupaten Ciamis. Dengan komitmen yang kuat dan kerjasama yang baik antara berbagai aktor yang terlibat, masalah permukiman kumuh di Kabupaten Ciamis dapat ditangani dengan lebih efektif dan berkelanjutan. Melalui upaya yang komprehensif dan terintegrasi dapat tercipta lingkungan permukiman yang lebih layak, sehat, dan Sejahtera bagi seluruh warga Kabupaten Ciamis.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

##### BUKU :

- Basrowi & Suwandi. (2009). *Memahami penelitian kualitatif*. PT. Rineka Cipta
- Creswell, W, John (2014) *Research Design (Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, diterjemahkan Oleh Ahmad, Fawaid dan Rinayati Kusmini , Edisi ke-4. Putaka Pelajar, Yogyakarta.
- Indahri, Y. (2017). *Tantangan Pengelolaan Penduduk di Kota Surabaya. Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 8(1), 1-11.
- Prafitri, N., & Utami, W. K. (2021). *Sinergi Aktor Street Level Bureaucracy Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Di Kota Serang. JIPAGS (Journal of Indonesian Public....* <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS/article/view/9482>.
- Prayojana, T. W., Mardhatil, M., Fazri, A. N., & Saputra, B. (2020). *Dampak urbanisasi terhadap pemukiman*

- kumuh (slum area). Jurnal Kependudukan Dan Pembangunan Lingkungan, 1(2), 60-69.*
- Rangkuti, N. A., Milanie, F., & Sugiarto, A. (2023). *Model for Determining Follow-up Actions in Slum Areas in North Sumatra: Case Study in Tebing Tinggi City. International Journal Papier Advance and Scientific Review, 4(3), 18-29.*
- Ridlo, M. A. (2020). *Permukiman liar (Squatter Settlement) di jalur kereta api kota Semarang. Jurnal Planologi, 17(2), 150-167.*
- Roshanti, D., Laili, R. N., Munif, B., & Habibitasari, B. B. (2022). *Analisis Peran Aktor Dalam Formulasi Kebijakan Pogram Sekardadu (Sekolah Rawat Daerah Aliran Sungai Di Banyuwangi). Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan, 1(3), 56-70.*
- Sabitha, F. A. (2022). *Analisis pengaruh tingkat urbanisasi terhadap ketersediaan lahan lahan permukiman perumahan di Kota Surabaya. Jurnal Lemhannas RI, 10(1), 19-26.*
- Satispi, E., & Patrianti, T. (2022). *Pesan Kolaborasi dalam Komunikasi Risiko Pemerintah untuk Penanganan Covid-19. Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis, 6(1), 51-61.*
- Tjaja, R. P. (2009). *Menuju Penduduk Tumbuh Seimbang Tahun 2020.*